



REVIEW KEBIJAKAN LEMBAGA OMBUDSMAN DIY Rektor UJB Paparkan Strategi Pengembangan Trans Jogja

YOGYA (KR) - Trans Jogja telah menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama di wilayah perkotaan. Namun berbagai tantangan seperti keterbatasan armada, rute yang belum optimal serta koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan angkutan publik masih menjadi persoalan.

Rektor Universitas Janabada Yogyakarta, Dr Risdiyanto memaparkan sejumlah strategi untuk pengembangan Trans Jogja sebagai angkutan umum publik. Menurutnya, subsidi untuk Trans Jogja perlu dilanjutkan, agar kualitas pelayanan dan kenyamanan bisa meningkat serta tarif Bus Trans Jogja tetap terjangkau oleh masyarakat.

"Subsidi tersebut sebisa mungkin tidak hanya dari Pemerintah Provinsi tapi juga dari Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY," kata Risdiyanto dalam acara Review Kebijakan Lembaga Ombudsman DIY tentang Transportasi Publik dan Layanan Trans Jogja, Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY dalam Penyelenggaraan Angkutan Publik di Kantor Lembaga Ombudsman DIY, Jalan Tentara Zeni, Pingit Kidul Yogyakarta, Selasa (15/4).

Review Kebijakan Lembaga Ombudsman DIY kali ini menghadirkan narasumber lain yakni Wulan Sapto Nugroho SSIT MT (Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan DIY) dan Yusticia Eka Noor Ida ST MSc (Wakil Ketua Lembaga Ombudsman DIY Bi-



Rektor UJB Dr Risdiyanto (dua dari kanan) saat menyampaikan paparan.

dang Pengembangan dan Kelembagaan). Adapun peserta kegiatan antara lain, perwakilan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota se DIY, Forum Transportasi for Jogja, Masyarakat Transportasi Indonesia dan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM.

Menurut Risdiyanto, strategi lain agar Bus Trans Jogja semakin diminati masyarakat yaitu keberadaan halte yang dekat dengan warga, sehingga jarak tempuh (jalan kaki) menuju halte tidak jauh. Kemudian diperlukan juga optimalisasi trayek/rute Trans Jogja agar rutanya tidak muter-muter serta pemendekan waktu tunggu. "Rute sebaiknya tidak lebih panjang 20% dari jarak tempuh jika menggunakan kendaraan pribadi," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan Risdiyanto, strategi tak kalah penting yaitu menekan pertumbuhan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor, secara bertahap. "Kita susah payah memperbaiki angkutan umum, tapi kalau penambahan kendaraan pribadi sangat pesat dan semakin banyak, ya berat. Maka perlu upaya menekan secara

bertahap," ujarnya.

Yusticia Eka Noor Ida mengatakan Lembaga Ombudsman DIY sebagai lembaga pengawas pelayanan publik memiliki peran strategis untuk melakukan review kebijakan. Adapun tujuan review kebijakan kali ini mengevaluasi kebijakan dan implementasi layanan transportasi publik di DIY, khususnya Trans Jogja. Menganalisis komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan angkutan publik. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan tata kelola transportasi publik kepada pemangku kebijakan terkait.

Sementara itu, Wulan Sapto Nugroho mengatakan terkait evaluasi trayek/rute Trans Jogja, pihaknya telah melakukan evaluasi dengan beberapa rute telah disesuaikan. Penyesuaian rute Trans Jogja tersebut dilakukan dengan mempertimbangan keberadaan halte-halte yang sudah ada.

"Banyak pertimbangan untuk mengubah rute, sehingga untuk melakukan perubahan rute/trayek Trans Jogja secara total dan menyeluruh belum bisa dilakukan untuk saat ini," katanya. (Dev)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005